

BUKTI BARU

Sekretaris PWI Kota Tangsel, Kritik: Vitamin Demokrasi, Bukan Ancaman Bagi Pemerintah

Admin - BUKTIBARU.COM

May 23, 2026 - 14:02



Edy Riyadi / Sekretaris PWI Kota Tangerang Selatan

TANGERANG - Di jantung sebuah negara demokrasi, kritik seharusnya bukanlah musuh bagi pemerintah, melainkan vitamin esensial yang vital. Ia hadir untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalurnya, mencegahnya kehilangan arah. Namun, di tengah gelombang kebijakan yang kerap memicu perdebatan sengit, sebuah pertanyaan sederhana sering kali mengemuka: ketika suara rakyat dipenuhi keluhan, ketika beban ekonomi kian terasa berat akibat kenaikan

harga kebutuhan pokok, saat pelayanan publik belum mampu menjawab harapan, dan jurang ketimpangan masih menganga lebar, apakah membisu adalah langkah yang paling bijak?

Bagi insan pers, jawabannya jelas: tidak. Kata adalah senjata ampuh kami. Senjata untuk menyajikan fakta yang sebenarnya, membongkar segala bentuk ketidakadilan, dan mengingatkan mereka yang telah dipercaya rakyat untuk memegang mandat kekuasaan agar tak melupakan tujuan mulia di balik amanah tersebut. Sebaliknya, memilih diam di kala kebijakan merugikan publik justru dapat diartikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap esensi kontrol sosial yang menjadi denyut nadi demokrasi itu sendiri.

Pemerintah memang memiliki hak prerogatif untuk merancang dan menjalankan program serta kebijakan. Namun, setiap keputusan publik yang diambil harus siap diuji oleh pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat. Mengapa anggaran begitu besar dialokasikan untuk proyek tertentu, sementara kebutuhan mendasar rakyat masih banyak yang terabaikan? Mengapa janji efisiensi sering kali digaungkan dengan lantang, namun praktik pemborosan anggaran justru masih menjadi sorotan tajam? Dan mengapa suara riil di lapangan kerap tenggelam oleh narasi keberhasilan yang dibangun semata-mata melalui panggung seremonial dan pencitraan semata?

Pertanyaan-pertanyaan ini sejatinya bukanlah cerminan kebencian terhadap pemerintah. Justru sebaliknya, ia adalah manifestasi kepedulian mendalam terhadap masa depan tata kelola pemerintahan yang lebih sehat dan berintegritas. Demokrasi yang matang bukanlah khazanah yang steril dari kritik. Ia adalah sistem yang mampu menjadikan setiap kritik sebagai bahan evaluasi berharga untuk perbaikan.

Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa penyimpangan dalam kekuasaan sering kali berakar bukan karena minimnya orang yang mengetahui, melainkan karena terlalu banyak pihak yang memilih bungkam. Ketika para pejabat merasa tidak ada mata yang mengawasi, transparansi akan terkikis. Ketika masyarakat merasa takut untuk bersuara, akuntabilitas akan kehilangan makna sejatinya. Dan ketika media kehilangan keberanian untuk mengkritik, kekuasaan berpotensi menjelma menjadi ruang yang hanya dipenuhi oleh puja-puji.

Di sinilah peran vital jurnalisme menjadi sangat krusial. Tugas media bukanlah sekadar menjadi corong kekuasaan atau pengeras suara kebencian. Media harus memosisikan diri di tengah, berdiri tegak berpihak pada fakta dan kepentingan publik. Ketika kebijakan pemerintah dinilai tepat sasaran dan membawa manfaat, media wajib memberikan apresiasi. Namun, ketika kebijakan tersebut menyimpang dari kebutuhan riil rakyat, media juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan dengan tegas dan tanpa keraguan.

Pada akhirnya, bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya pandai mengangguk. Bangsa ini memerlukan warga negara yang memiliki kepedulian tinggi, akademisi yang berani menyampaikan pandangannya, aktivis yang konsisten mengawal setiap kebijakan, dan tentu saja, para jurnalis yang tetap setia pada panggilan nurani profesinya. Sebab dalam arena demokrasi, kata bukanlah sekadar kumpulan huruf. Kata adalah senjata ampuh untuk melawan ketidakadilan. Dan ketika ketidakadilan dibiarkan merajalela tanpa

suara yang berani menyuarakannya, maka diam bukanlah lagi sebuah kebijaksanaan—melainkan sebuah pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat yang seharusnya kita bela mati-matian.